

Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau

Djaimi Bakce ^{*1}, Almasdi Syahza ², Brilliant Asmit ²

¹Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

* djaimi.bakce@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Bagian dari Provinsi Riau terletak di Jalur Perdagangan Internasional Selat Malaka yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, namun lokasi strategis tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan model dan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan antara negara-negara di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan ekonomi daerah saat ini di daerah perbatasan antara negara-negara di Provinsi Riau. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis isi digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi strategis tidak membuat lokasi prioritas pembangunan daerah perbatasan antar negara menjadi lebih maju dari daratan Riau. Kepadatan penduduk di kabupaten/ kota di daerah perbatasan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Riau. Sementara rasio jumlah penduduk produktif dan tidak produktif ideal dan dapat bonus demografi sebagai modal dasar pembangunan. Kabupaten/ kota yang terletak di daerah perbatasan antar negara pada wilayah pesisir dan laut dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam rangka untuk membuat daerah-daerah perbatasan antara negara-negara di sejumlah kabupaten / kota di Provinsi Riau sebagai beranda depan perlu mempercepat pembangunan dan penataan sarana dan prasarana maritim. Pendekatan pembangunan daerah perbatasan yang berfokus pada pertahanan dan keamanan harus bergeser ke pendekatan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Selain itu, pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir, khususnya pengembangan industri pengolahan yang dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kata Kunci: pembangunan ekonomi, daerah perbatasan, nilai tambah

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah suatu negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah dengan negara lain berdasarkan garis batas pemisah kedaulatan suatu negara secara hukum internasional. Kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Menurut Setiadi (2009), kawasan perbatasan sering dilihat sebagai periphery suatu negara karena letaknya yang jauh dari ibu kota provinsi apalagi ibu kota negara. Sementara itu, Todaro (2006) menyebutkan daerah pinggiran sebagai daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitar pusat pertumbuhan, yang menggambarkan hubungan kekuatan yang sangat tidak seimbang antara pusat (*core*) dengan pinggiran (*periphery*).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Paradigma pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang berorientasi inward looking, menjadi outward looking. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*), dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan (*environment*) tetap menjaga kedaulatan (*sovereignty*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pengelolaan wilayah perbatasan negara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) telah merumuskan 4 (empat) isu strategis pengelolaan perbatasan antar negara, yaitu isu: (1) pengelolaan batas wilayah negara (*boundary/border line issues*), (2) pengelolaan lintas

batas (*cross-border issues*), (3) pembangunan kawasan perbatasan (*frontier issues*), dan (4) kelembagaan (*institutional issues*).

Isu pengelolaan batas negara mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek penyelesaian dan penegakan batas wilayah negara, dan aspek peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum. Permasalahan yang mengemuka dari aspek penyelesaian dan penegakan batas wilayah negara adalah: (1) belum tuntasnya penyelesaian dan penegakan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen, (2) belum tuntasnya penyelesaian dan penyepakatan batas laut (Laut teritorial, Batas ZEE dan Landas Kontinen) dengan negara tetangga, dan (3) Belum selesainya penegakan batas kawasan udara Indonesia dengan negara tetangga. Sementara itu, permasalahan yang mengemuka dari aspek peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum adalah: (1) belum optimalnya aspek pengawasan dalam mengawasi tanda batas, (2) belum optimalnya upaya pemeliharaan tanda batas, dan (3) belum optimalnya aspek pengawasan perbatasan laut dan udara.

Isu pengelolaan lintas batas mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: aspek ekonomi lintas batas, aspek pengamanan dan pengawasan, aspek sosial-budaya lintas batas, dan aspek sarana dan prasarana lintas batas. Permasalahan yang mengemuka dari aspek ekonomi lintas batas adalah: (1) belum efektifnya kerjasama perdagangan antarnegara, (2) adanya ketergantungan masyarakat di Lokpri terhadap negara tetangga, dan (3) belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015. Permasalahan yang mengemuka dari aspek pengamanan dan pengawasan adalah: (1) maraknya kegiatan ilegal di Lokpri (*fishing, entry, logging, human trafficking*, dan lainnya), dan (2) belum optimalnya upaya pengawasan di Lokpri akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan. Selanjutnya permasalahan yang mengemuka dari aspek sosial-budaya lintas batas adalah: (1) belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokpri, dan (2) hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan sebagai peluang kerjasama antarnegara. Sementara itu permasalahan yang mencuat dari aspek sarana dan prasarana lintas batas adalah: (1) belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokpri, dan (2) hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan sebagai peluang kerjasama antarnegara.

Isu pembangunan kawasan perbatasan juga mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: aspek penataan ruang kawasan perbatasan, aspek infrastruktur kawasan perbatasan, aspek pertumbuhan ekonomi, dan aspek pelayanan sosial dasar. Permasalahan dari aspek penataan ruang kawasan perbatasan adalah belum tuntasnya penataan ruang kawasan perbatasan sehingga menyulitkan proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan. Permasalahan dari aspek infrastruktur kawasan perbatasan, meliputi: (1) terbatasnya infrastruktur kawasan perbatasan yang menyebabkan belum terbukanya keterisolasian sebagian wilayah kawasan perbatasan, dan (2) rendahnya daya jangkau pelayanan infrastruktur kawasan perbatasan berakibat pada rendahnya konektivitas kawasan terhadap kawasan sekitar (PKSN dan pusat kegiatan lokal). Selanjutnya permasalahan dari aspek pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) belum optimalnya nilai tambah produksi di Lokpri (dibandingkan negara tetangga maupun terhadap PKSN), (2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDA di Lokpri, dan (3) Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri. Sementara itu, permasalahan dari aspek pelayanan sosial dasar meliputi: (1) minimnya sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di Lokpri (pendidikan, kesehatan, sanitasi, dsb), dan (2) rendahnya kualitas SDM di Lokpri akibat belum optimalnya pelayanan peningkatan kualitas SDM.

Selanjutnya permasalahan yang mengemuka dari isu kelembagaan adalah: (1) belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, (2) belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara tetangga, dan (3) terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta kemampuan SDM lembaga pengelola perbatasan.

Mencermati empat isu yang telah dikemukakan di atas, untuk memperoleh hasil penelitian yang tuntas spesifik keilmuan, penelitian ini difokuskan pada isu pembangunan kawasan perbatasan, khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan yang akan dicermati dalam penelitian ini adalah: (1) belum optimalnya nilai tambah produksi di Lokpri (dibandingkan negara tetangga maupun terhadap PKSN), (2) belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDA di Lokpri, dan (3) belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri.

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menemukan Model dan Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan antar negara di Provinsi Riau. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini pembangunan ekonomi wilayah perbatasan antar negara di Provinsi Riau.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia), yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Lokasi Prioritas (Lokpri) pengembangan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi dan Kecamatan Bangko. Lokpri di Kota Dumai meliputi Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Selanjutnya Lokpri di Kabupaten Bengkalis meliputi Kecamatan Rupert Utara, Rupert, Bengkalis, Bantan, dan Bukit Batu. Sementara itu, Lokpri di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, dan Kecamatan Tasyik Putri Puyu.

Penelitian ini dilaksanakan selama 11 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan November 2018. Kegiatan penelitian yang dilakukan mulai dari penyusunan proposal sampai dengan pelaporan.

Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari dinas/instansi terkait maupun dari sumber-sumber lainnya yang relevan. Data primer diperoleh dari wawancara dan/atau observasi langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat, pengumpulan data primer menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assessment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif singkat.

Analisis Data

Untuk mengetahui kondisi terkini pembangunan ekonomi wilayah perbatasan antar negara di Provinsi Riau digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis content. Analisis statistik deskriptif berupa analisis tabulasi silang tentang kondisi eksiting sejumlah indikator makro maupun indikator mikro ekonomi menurut sektor dan/atau komoditas penting menurut lokasi prioritas (Lokpri) pada setiap kabupaten/kota yang menjadi wilayah penelitian. Analisis content berisikan tentang deskripsi kebijakan dan/atau ilustrasi tentang kondisi terkini dalam pengembangan ekonomi di lokasi prioritas.

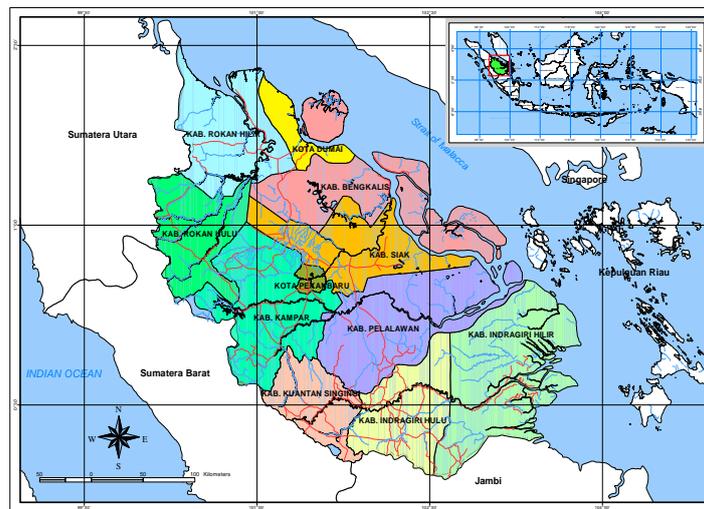
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografi

Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara dan antara 100°00'00" Bujur Timur hingga 105°05'00" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka (Gambar 1). Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat; sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura, selain itu berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Sementara itu, Negara Kepulauan Republik Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara memiliki 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memerlukan penanganan khusus. Diantara PPKT tersebut terdapat 10 PPKT yang menjadi prioritas penanganan. Secara administrasi PPKT tersebut terdapat di 13 provinsi, di 41 kabupaten/kota dan di 187 kecamatan yang menjadi Lokasi Strategis (Lokpri). 10 diantara Lokpri-Lokpri tersebut terdapat di enam kabupaten dan kota di Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan. Prioritas

penanganan secara khusus direncanakan secara simultan dan bertahap mulai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci berdasarkan Perka BNPP nomor 1 Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 1. Letak Geografis Provinsi Riau

Tabel 1. Lokasi prioritas perbatasan negara di provinsi riau tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Lokpri (Kecamatan)
1	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas Sinaboi
2	Dumai	Bangko Dumai Kota Medang Kampai Sungai Sembilan Dumai Timur Dumai Barat
3	Bengkalis	Rupat Utara Rupat Bantan Bengkalis Bukit Batu
4	Kep. Meranti	Rangsang Barat Rangsang Pesisir Merbau Rangsang Pulau Merbau Tasik Putri Puyu
5	Pelawan	Kuala Kampar
6	Indragiri Hilir	Kateman Pulau Burung

Sumber: Penyusunan Rencana Induk PKP Provinsi Riau 2016

Di Provinsi Riau secara geografis masih terdapat daerah pedalaman, yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Suku pedalaman atau yang biasa disebut dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebut hidup di sejumlah hutan yang terdapat di Provinsi Riau, keberadaan KAT mulai berangsur-angsur punah seiring dengan izin-izin konsesi terhadap pemanfaatan hutan dan lahan, sehingga tidak lagi mempunyai rumah dan kebudayaan. Menurut Kurtubi dalam Dinas Sosial Provinsi Riau (2017), Komunitas Adat Terpencil yang terdapat di Provinsi Riau dikelompokkan dalam 5 Suku, yaitu Suku Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Bonai dan Suku Laut (Duano).

Kondisi Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek

pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 6.657.911 orang terdiri dari laki-laki 3.416.307 orang dan perempuan 3.241.604 orang berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, BPS RI, dan United Nations Population Fund (UNFPA) serta para pakar demografi. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Riau selama periode 2010-2017 mengalami peningkatan sebanyak 1.082.983 jiwa atau meningkat sebesar 19,43% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,57%.

Kepadatan Penduduk di Provinsi Riau tahun 2017 mencapai 73 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Provinsi Riau tiap tahunnya semakin bertambah dibandingkan tahun 2012 yang hanya 66 jiwa per km² atau naik sebesar 10,61%, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini. Data jumlah dan kepadatan penduduk dirinci menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.

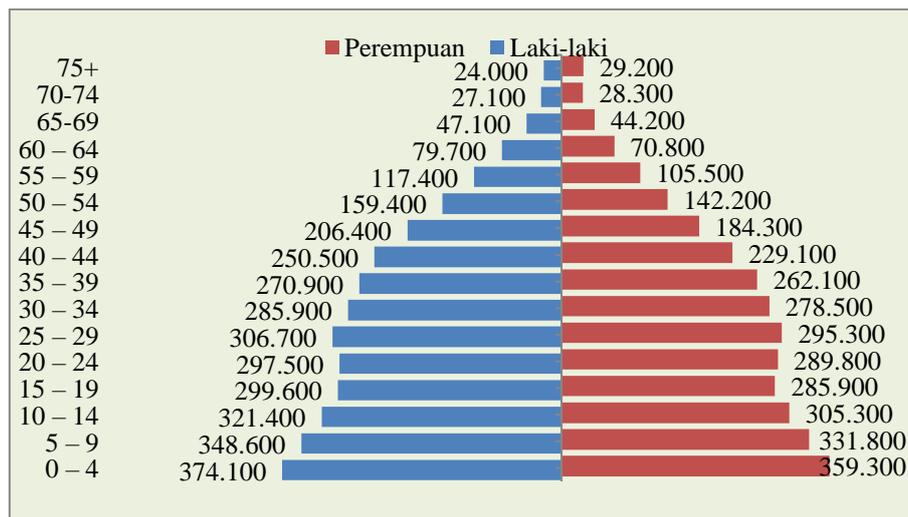
Tabel 2. Jumlah dan kepadatan penduduk dirinci menurut kabupaten/ kota di provinsi riau tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Uraian	
				Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²)
Kuantan Singingi	527.273,74	164.769	156.447	321.216	60,92
Indragiri Hulu	797.816,84	218.496	207.401	425.897	53,38
Indragiri Hilir	1.346.589,47	370.603	351.631	722.234	53,63
Pelalawan	1.302.018,65	225.234	213.554	438.788	33,70
Siak	784.396,97	238.837	226.577	465.414	59,33
Kampar	1.089.721,66	427.065	405.322	832.387	76,39
Rokan Hulu	752.743,28	329.047	312.161	641.208	85,18
Bengkalis	852.043,63	286.865	272.216	559.081	65,62
Rokan Hilir	915.472,45	348.782	330.881	679.663	74,24
Kep.Meranti	363.679,18	93.961	89.336	183.297	50,40
Pekanbaru	63.340,30	559.917	531.171	1.091.088	1.722,58
Dumai	217.779,79	152.731	144.907	297.638	136,67
Provinsi Riau	9.012.875,96	3.416.307	3.241.604	6.657.911	73,87

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat adalah Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.722 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 1.091.088 jiwa atau sebesar 16,39% dari total penduduk Provinsi Riau tahun 2017. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebanyak 50 jiwa/km². Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

Piramida penduduk menunjukkan banyaknya penduduk yang berusia produktif antara 15-64 tahun atau sebesar 65,61 persen pada tahun 2016. Komposisi umur penduduk Provinsi Riau dapat digambarkan dalam piramida penduduk pada Gambar 2. Model piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi Provinsi Riau.

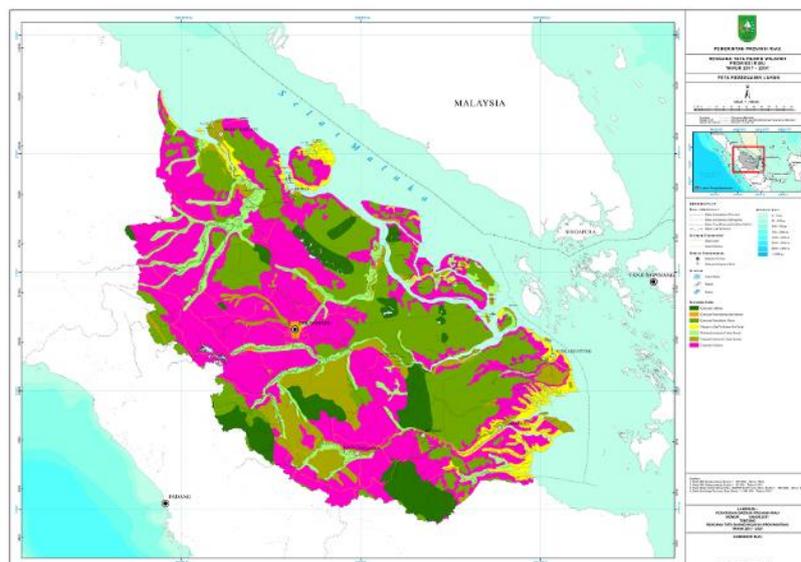


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, BPS RI, dan UNFPA (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Gambar 2. Piramida Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau Tahun 2017

Potensi Sumberdaya

Berdasarkan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Provinsi Riau 2016-2035 (Gambar 3) ditetapkan bahwa penggunaan lahan terluas digunakan untuk sub sektor perkebunan sebesar 30,34% atau 2.734.636,81 hektar dan paling sempit adalah savana/padang rumput seluas 80,85 hektar atau 0,001% dari total penggunaan lahan seluas 9.012.875,96 hektar di provinsi Riau tahun 2016. Data tutupan lahan ini dapat digunakan untuk memperkirakan berapa potensi pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan peruntukan ruang. Pengembangan sektor-sektor potensi baik pertanian dan non pertanian sudah dituangkan dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Provinsi Riau 2016-2035 sebagaimana tutupan lahan Gambar 2.21 di atas. Berdasarkan pada Rancangan RTRW Provinsi Riau tersebut menunjukkan bahwa luas penggunaan lahan eksisting tahun 2017 menurut tutupan lahan menunjukkan bahwa terdapat dua sub sektor yang mendominasi penggunaan lahan yaitu perkebunan dan kehutanan.



Gambar 3. Tutupan Lahan Provinsi Riau Berdasarkan RTRW 2016-2035

Kawasan budidaya ruang daratan di wilayah Riau, mencakup di dalamnya kawasan pesisir, lokasinya tersebar ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Kawasan budidaya tersebut dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut Kawasan Hutan Produksi direncanakan untuk dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Hutan Rakyat dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Pada tahun 2017 sektor pertanian memberikan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) Provinsi Riau terhadap harga konstan sebesar 25,30% menempati urutan kedua dari 17 sektor lapangan usaha dalam

perekonomian. Kontribusi yang besar tersebut terutama disumbangkan oleh sub sektor perkebunan dengan empat komoditas utama yaitu kelapa sawit, kelapa dan karet serta sagu.

Berdasarkan data Rancangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2016-2035 dinyatakan bahwa luas kawasan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian lahan kering seluas 335.556 hektar (lihat Tabel 2.29). Sedangkan penggunaan lahan secara rinci di Provinsi Riau didominasi oleh: (1) Perkebunan seluas 2.734.637 Ha; (2) Pertanian lahan kering seluas 1.374.58 Ha.; (3) Hutan Rawa Sekunder seluas 973.927 Ha; (4) Semak Belukar Rawa seluas 928.248 Ha; (5) Hutan Tanaman seluas 861617 Ha; (6) Tanah Terbuka seluas 546.670 Ha; (7) Pertanian Lahan Kering seluas 335.566 Ha; (8) Hutan Sekunder seluas 321.074 Ha; dan (9) Penggunaan lahan lainnya seluas 836.547 Ha.

Luasnya lahan perkebunan di Provinsi Riau telah memberikan kontribusi yang positif terhadap PDRB sebesar 25,30%, disisi lain luasnya lahan perkebunan tersebut didominasi oleh perkebunan rakyat dengan produktivitas lebih rendah dari dibandingkan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Hal ini mengindikasikan perkebunan rakyat secara umum belum mampu mensejahterakan masyarakat provinsi Riau, ini terlihat dari masih terdapat 48,16% dari angka kemiskinan pada sektor pertanian terjadi pada masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha perkebunan. Oleh karena itu diperlukan program upaya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat pada semua komoditas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha sub sektor perkebunan.

Wilayah Pesisir dan Laut Perairan pesisir dan laut Provinsi Riau yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumber daya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumber daya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Pertama, kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan untuk berlokasi: (1) Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupt dengan potensi perikanan dari jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting; (2) Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur dengan potensi perikanan dari jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting; dan (3) Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan dari jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting. Dan kedua, kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas: (1) Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota, Kawasan ini terutama terdapat di kawasan sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai; dan (2) Budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di Kabupaten Bengkalis, di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupt Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang, Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut dangkal Selat Malaka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Provinsi Riau memiliki sejumlah lokasi prioritas (lokpri) pengembangan kawasan perbatasan antar negara yang terdapat pada enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Rokan Hilir (3 lokpri), Kota Dumai (5 lokpri), Kabupaten Kepulauan Meranti (6 lokpri), Kabupaten Bengkalis (4 lokpri), Kabupaten Indragiri Hilir (2 lokpri), dan Kabupaten Pelalawan (1 lokpri).
2. Letak wilayah yang strategis karena berada pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, berbatasan langsung dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, dan berada pada segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Letak wilayah yang strategis tersebut tidak menjadikan lokasi-lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan antar negara menjadi lebih maju dibandingkan wilayah Riau daratan. Tercatat ada dua suku yang masih tertinggal, yaitu Suku Akit dan Suku Laut.
3. Tingkat kepadatan penduduk pada kabupaten/kota di wilayah perbatasan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Sementara itu rasio jumlah penduduk produktif dan tidak produktif di Provinsi Riau pada umumnya, di wilayah perbatasan antar negara pada khususnya, cukup ideal dan dapat menjadi bonus demografi sebagai modal dasar pembangunan.

4. Kabupaten/kota yang terletak pada wilayah perbatasan antar negara merupakan wilayah pesisir dan laut dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki meliputi ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya. Sumber daya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Disamping itu, pada wilayah perbatasan antar negara juga memiliki potensi yang sama dengan wilayah Riau Daratan bagi pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Saran dari hasil kajian ini adalah:

1. Menjadikan wilayah perbatasan antar negara pada sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai beranda terdepan melalui percepatan pembangunan dan penataan sarana dan prasarana kemaritiman. Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan yang menfokuskan pada pertahanan dan keamanan sebaiknya dialihkan pada pendekatan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia.
2. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam pesisir dan kelautan, pertambangan dan pertanian dalam arti luas, perlu dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir. Bagi usaha-usaha potensial yang belum berkembang ditekankan pada upaya pengembangan di sektor hulu, sedangkan bagi usaha-usaha yang sudah ada ditekankan pada pengembangan industri pengolahan yang menghasilkan produk-produk yang siap saji atau konsumsi, sehingga menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2006. Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, BAPPENAS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. Riau Dalam Angka. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Perka BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11).
- Setiadi. 2009. Konsep Pusat-Pinggiran: Sebuah Tinjauan Teoritis. Working paper on Regional Development Studies Nomor: KKI-01/KBP-PW/2009, Hal: 2-3. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Todaro M, dan S. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid 1 Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.